

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara maju ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara negara berkembang masih berupaya memperbaiki kondisi ekonominya. Adapun tujuan dari pembangunan nasional sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum mencakup terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, maupun sosial masyarakat, sehingga mereka dapat hidup dengan layak, berkembang, maupun menjalankan tugas sosial serta ekonominya. Kesejahteraan umum dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, karena isu kemiskinan adalah hal yang sangat krusial dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan atau kegagalan dalam pertumbuhan ekonomi sering kali diukur berdasarkan perubahan tingkat kemiskinan yang terjadi.

Kemiskinan adalah masalah yang umum di berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia, yang secara umum merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari guna bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini mencakup pangan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk kehidupan yang layak (Cahyani dan Muljaningsih, 2022). Dalam konteks ini, kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, terlihat di berbagai daerah, baik di kota maupun di desa. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, yang pada akhirnya menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia terus meningkat (Hermawan dan Bahjatulloh, 2022).

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, di antaranya adalah perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang berbeda namun saling melengkapi mengenai penyebab dan dampak kemiskinan. Perspektif makroekonomi melihat kemiskinan dalam konteks perekonomian secara keseluruhan, sementara mikroekonomi lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan rumah tangga. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kemiskinan di tingkat makro maupun mikro Cashin et al., (2001).

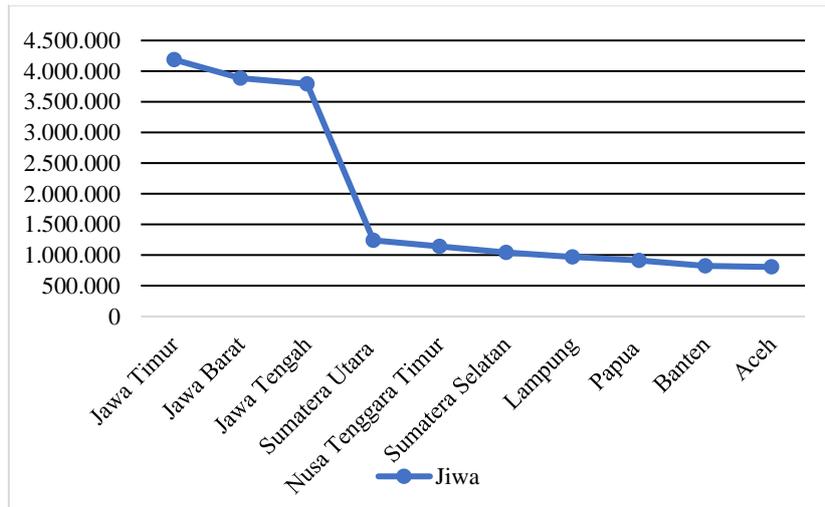
Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dari sisi ekonomi secara keseluruhan (makroekonomi) ataupun dari sisi individu dan rumah tangga (mikroekonomi). Menurut Cashin et al. (2001), yang memandang kemiskinan dalam dua aspek: makroekonomi yang melihat kondisi ekonomi secara luas, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal serta moneter; dan mikroekonomi yang lebih fokus pada bagaimana individu maupun rumah tangga miskin dapat mengakses pendidikan, kesehatan, serta pasar kerja untuk mengurangi kemiskinan mereka..

Di sisi lain, Menurut Bourguignon et al., (2009) mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda tetapi lebih luas, dengan menggabungkan pendekatan makroekonomi dan mikroekonomi. Mereka berpendapat bahwasanya kemiskinan sebaiknya dipahami melalui keduanya, dengan fokus pada distribusi pendapatan dan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan. Mereka menekankan bahwasanya kebijakan ekonomi yang baik seharusnya mempengaruhi pembagian

pendapatan yang lebih merata dan menciptakan peluang bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin. Dalam pendekatan mikroekonomi, mereka juga menyoroti pentingnya akses individu terhadap pendidikan dan pekerjaan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Selain itu, Azis, (2008) menambahkan sudut pandang yang lebih terfokus pada hubungan antara kebijakan ekonomi makro dan kesejahteraan rumah tangga miskin. Menurutnya, pemahaman terhadap kemiskinan harus melibatkan pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin, serta bagaimana pendapatan yang lebih merata bisa mengurangi kesenjangan sosial. Aziz menekankan bahwasanya kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang merata dan adil sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Dari sisi mikroekonomi, dia juga menekankan pentingnya akses pada layanan Kesehatan, pendidikan, maupun sumber daya ekonomi lainnya untuk menambah tingkatan kualitas hidup keluarga maupun individu..

Gambar 1.1. 10 Provinsi Dengan Kemiskinan Tertinggi Di Indonesia 2023



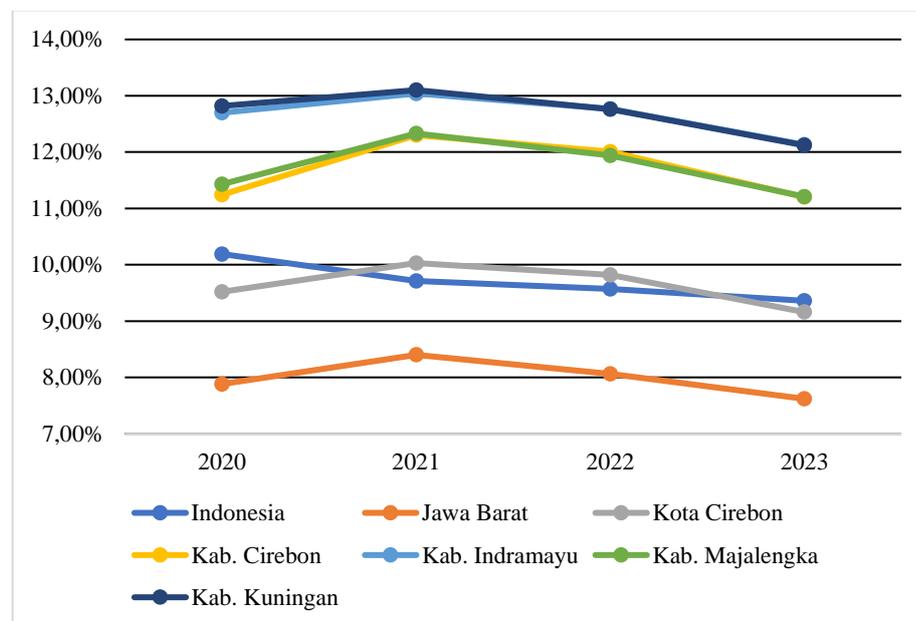
Sumber: Badan Pusat Statistik

Sebagaimana tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia 2023 diatas menunjukkan bahwasanya Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.188.810 jiwa, posisi kedua yaitu Jawa Barat dengan angka penduduk miskin sebanyak 3.888.600 jiwa, posisi ketiga terdapat Jawa Tengah sebesar 3.791.500, dan posisi selanjutnya terdapat Provinsi Sumatera Utara, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Papua, Banten, dan Aceh. Angka-angka ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh kesepuluh Provinsi dalam mengentaskan kemiskinan, yang menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai Gini Rasio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, maupun Pertumbuhan Ekonomi pada kedalaman kemiskinan di masing-masing daerah terutama di Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur klaster ekonomi yang terorganisir dengan baik, macamnya adalah Klaster Priangan Timur yang di antaranya meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis. Di dalam klaster ini terdapat sub-klaster yaitu CIAYUMAJAKUNING, yang meliputi daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Dengan memiliki potensi unggulan di setiap

masing-masing seperti, sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Program pengembangan kluster pangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan kestabilan harga komoditas melalui penerapan pertanian berkelanjutan (Noviyanti et al., 2019). Meskipun ada potensi ekonomi yang besar, kemiskinan tetap menjadi masalah utama di wilayah ini. Faktor-faktor seperti variabel ekonomi makro dan mikro yang juga berhubungan dengan kemiskinan.

Gambar 1.2. Perbandingan Presentase Penduduk Miskin



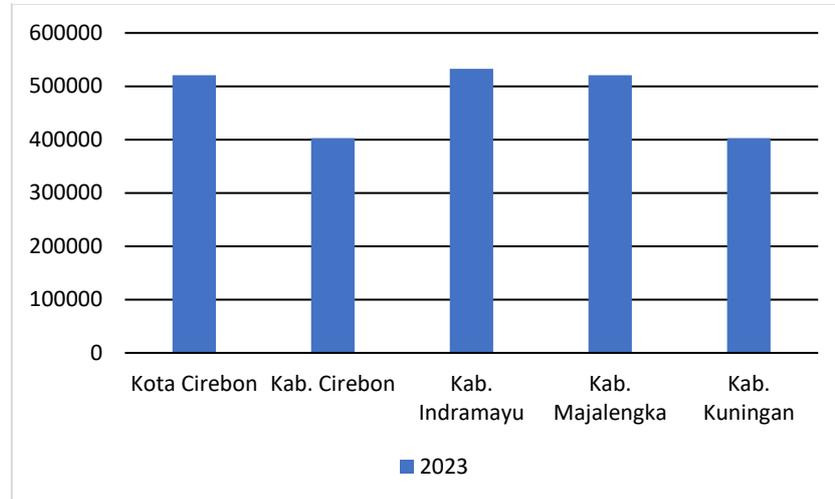
Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan dalam persentase kemiskinan di Indonesia dan daerah-daerah terkait antara 2020 hingga 2023. Secara nasional, persentase penduduk miskin di Indonesia turun dari 10,19% pada 2020 menjadi 9,36% pada 2023, dengan penurunan yang lebih pada periode 2020-2021 dan penurunan yang lebih lambat pada 2022-2023. Di Jawa Barat, angka kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 7,88% pada 2020 menjadi 7,62% pada 2023. Di tingkat kota, Kota Cirebon

mencatatkan penurunan kemiskinan dari 9,52% pada 2020 menjadi 9,16% pada 2023. Kabupaten Cirebon, Kuningan, Indramayu, maupun Majalengka memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan angka nasional. Kabupaten Indramayu mencatatkan angka kemiskinan tertinggi, meskipun menurun dari 12,7% pada 2020 menjadi 12,13% pada 2023.

Garis kemiskinan adalah batas minimum pendapatan yang dibutuhkan oleh individu atau keluarga agar terpenuhinya kebutuhan dasar, di antaranya yaitu pangan, sandang, dan papan, dengan mempertimbangkan harga barang dan jasa di suatu wilayah. Perhitungan garis kemiskinan didasarkan pada kebutuhan dasar setiap individu per bulan yang mencakup biaya hidup yang diperlukan guna memperoleh standar hidupnya yang layak. Kenaikan harga barang dan jasa, yang dipengaruhi oleh inflasi, akan langsung mempengaruhi garis kemiskinan karena semakin tinggi harga barang dan jasa, semakin besar pula jumlah pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Meskipun garis kemiskinan naik seiring dengan inflasi, hal ini tidak selalu berpengaruh langsung pada angka kemiskinan, karena perhitungan kemiskinan melibatkan faktor-faktor lain selain harga barang dan jasa (Dwi Puspa, 2016).

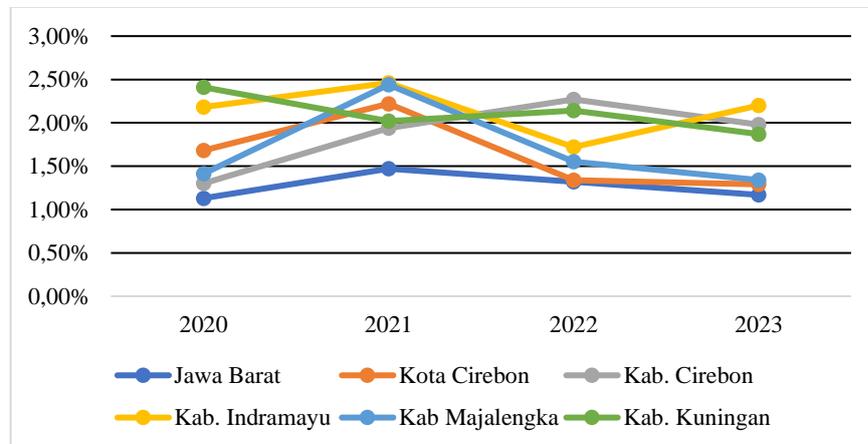
**Gambar 1.3. Garis Kemiskinan di wilayah
CIAYUMAJAKUNING**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Pada tahun 2023, garis kemiskinan di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan perbedaan antar daerah. Kota Cirebon memiliki garis kemiskinan tertinggi, yaitu Rp520.579, diikuti oleh Kabupaten Majalengka dengan angka yang hampir sama, Rp520.713. Sementara itu, Kabupaten Indramayu mencatat garis kemiskinan yang lebih tinggi daripada Kabupaten Cirebon, yakni Rp532.545. Di sisi lain, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan mencatatkan angka yang serupa, masing-masing sebesar Rp402.767.

Gambar 1.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Wilayah CIAYUMAJAKUNING



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di setiap wilayah menunjukkan fluktuasi yang bervariasi. Di Jawa Barat, angka P1 menurun dari 1,47% pada 2021 menjadi 1,17% pada 2023, menunjukkan semakin baik. Kota Cirebon sempat memburuk pada 2021 (2,22%) namun menurun menjadi 1,29% pada 2023, menunjukkan perbaikan. Kabupaten Cirebon, meski meningkat menjadi 2,27% pada 2022, turun sedikit menjadi 1,98% pada 2023, menandakan kondisi yang memburuk. Kabupaten Indramayu fluktuatif, mencapai 2,46% pada 2021 dan turun menjadi 2,2% pada 2023, sedikit membaik. Kabupaten Majalengka memburuk pada 2021 (2,44%) namun menurun menjadi 1,34% pada 2023, menunjukkan perbaikan. Sementara itu, Kabupaten Kuningan mengalami penurunan dari 2,41% pada 2020 menjadi 1,87% pada 2023, menunjukkan keadaan yang semakin baik.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik, sehingga solusinya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Menurut Ames et al., (2003) Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengurangan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, di mana

stabilitas ekonomi makro menjadi prasyarat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Stabilitas ini mencakup pengendalian inflasi, defisit fiskal, dan keseimbangan eksternal yang memungkinkan terciptanya iklim investasi yang kondusif. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup mengurangi kemiskinan secara efektif. Distribusi manfaat pertumbuhan dan sektor ekonomi yang berkembang juga memainkan peran penting. Pertumbuhan di sektor-sektor seperti pertanian, di mana kelompok miskin banyak terlibat, memiliki dampak lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi makro yang baik tidak hanya berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pertumbuhan dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui jaring pengaman sosial.

Ekonomi Makro dan Mikro didalamnya terdapat variabel-variabel yang mencakup seperti inflasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kestabilan perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan makroekonomi, yang diterapkan melalui kebijakan fiskal dan moneter, adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi agar dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam siklus bisnis, seperti resesi dan inflasi, dapat menyebabkan deviasi signifikan pada variabel-variabel makroekonomi dan berdampak besar terhadap masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan miskin. Pada saat resesi, penurunan produksi dan lapangan pekerjaan mengurangi kesempatan kerja, sementara inflasi menurunkan daya beli masyarakat. Kedua faktor ini memperburuk kondisi kemiskinan, karena kelompok miskin yang sangat bergantung pada pendapatan tetap akan semakin terdesak. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi ekonomi yang

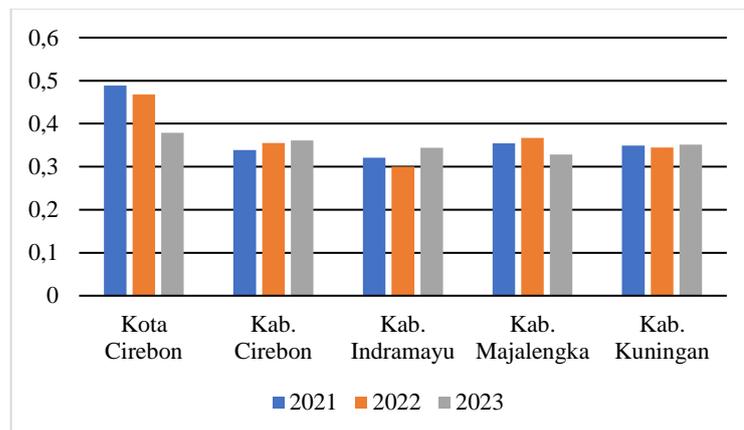
diterapkan pemerintah dan Bank Sentral, seperti pengelolaan pengeluaran negara dan pengaturan suku bunga, menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi ekonomi. Dampak dari ketidakstabilan ekonomi ini sering kali tercermin dalam peningkatan ketimpangan pendapatan, yang dapat diukur dengan indikator seperti Gini Ratio (KASHI & TASH, 2014).

Gini Ratio merupakan indikator yang diadopsi guna menilai tingkatan ketimpangan dalam distribusi pendapatan ataupun pengeluaran dalam suatu masyarakat. Ada berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk menghitung Gini Ratio, yang paling umum adalah melalui distribusi pendapatan atau pengeluaran. Pendekatan distribusi pendapatan menilai ketimpangan berdasarkan sebaran pendapatan individu atau rumah tangga, sementara pendekatan distribusi pengeluaran mengukur ketimpangan berdasarkan pola pengeluaran. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan distribusi pengeluaran untuk menghitung Gini Ratio.

Nilai Gini Ratio ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana ketimpangan pengeluaran terjadi di masyarakat, dengan nilai yang lebih tinggi memperlihatkan ketimpangan yang lebih besar, maupun nilai yang lebih rendah mencerminkan distribusi pengeluaran yang lebih merata di kalangan penduduk (Manalu et al., 2024). Menurut Wahid, (2021), Koefisien Gini mempunyai rentang nilai antara 0 - 1. Semakin dekat angka Gini ke 0, semakin merata distribusi pendapatannya, yang menunjukkan ketimpangan yang rendah. Akan tetapi, semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah atau negara, yang mengindikasikan bahwasanya ketidaksetaraan dalam pendapatan atau pengeluaran dapat

memperburuk kesenjangan sosial dan mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk mencapai distribusi yang lebih adil.

**Gambar 1.5. Gini Rasio Wilayah
CIAYUMAJAKUNING**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

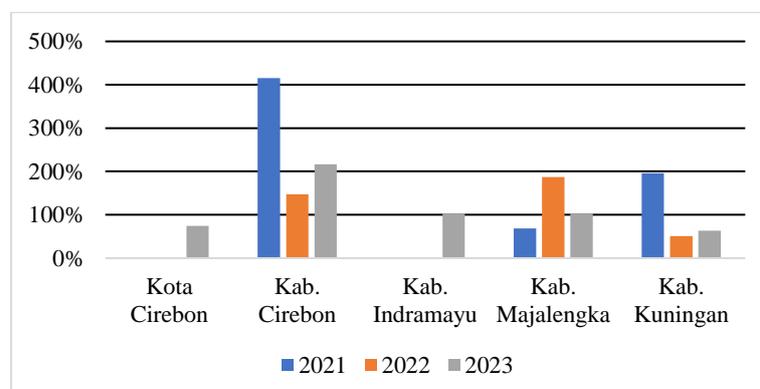
Data Gini Rasio di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan variasi antara daerah-daerah. Di Kota Cirebon, Gini Rasio mengalami pelemahan dari 0,489 pada 2021 menjadi 0,379 di 2023. Kabupaten Cirebon mencatatkan peningkatan, dengan Gini Rasio naik dari 0,339 pada 2021 menjadi 0,361 pada 2023. Kabupaten Indramayu menunjukkan fluktuasi, di mana Gini Rasio turun menjadi 0,300 pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 0,344 pada 2023. Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan dari 0,354 pada 2021 menjadi 0,367 pada 2022, tetapi Gini Rasio turun menjadi 0,328 pada 2023. Kabupaten Kuningan dengan Gini Rasio berada di angka 0,345 pada 2021, 0,345 pada 2022, dan 0,351 pada 2023.

Melihat variasi Gini Rasio di wilayah Ciayumajakuning, penting untuk mempertimbangkan peran bantuan sosial dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, karena bantuan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak ketimpangan pendapatan. Bantuan sosial adalah

sebagai bentuk intervensi negara dalam menyediakan dukungan finansial pada individu atau kelompok rentan sebagai upaya mitigasi terhadap potensi ancaman kesejahteraan sosial yang dapat timbul sewaktu-waktu. Bantuan ini bisa diberikan langsung kepada individu atau kelompok masyarakat, termasuk lembaga swasta yang bergerak di bidang keagamaan maupun pendidikan. Sementara itu, belanja bantuan sosial sebagai bentuk pengeluaran negara yang diwujudkan dalam uang, barang, atau jasa, dengan tujuan utama mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini bersifat sementara dan hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan (Rarun et al., 2018).

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, ditetapkan bahwasanya pemerintah daerah mempunyai kewenangan guna menyalurkan bantuan sosial kepada individu atau kelompok masyarakat, selaras dengan kapasitas fiskal setiap daerah. Diberikannya bantuan ini setelah pemerintah daerah memenuhi kebutuhan untuk urusan tidak wajib, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kelayakan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.

Gambar 1.6. Presentase Realisasi Belanja Bantuan Sosial Wilayah CIAYUMAJAKUNING



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Data presentase realisasi belanja bantuan sosial menunjukkan variasi antarwilayah. Kota Cirebon mulai mengalokasikan bantuan sosial pada 2023 dengan persentase 74,09%, setelah tidak ada alokasi pada 2021 dan 2022. Kabupaten Cirebon mengalami fluktuasi besar, dengan alokasi mencapai 415,57% pada 2021, turun menjadi 147,36% pada 2022, dan meningkat lagi menjadi 216,40% pada 2023. Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka tidak memiliki alokasi pada 2021 dan 2022, namun mulai mengalokasikan dana pada 2023, dengan persentase masing-masing 103,18% dan 103,06%. Kabupaten Kuningan menunjukkan penurunan, dari 195,60% pada 2021 menjadi 50,62% pada 2022, dan meningkat menjadi 63,50% pada 2023.

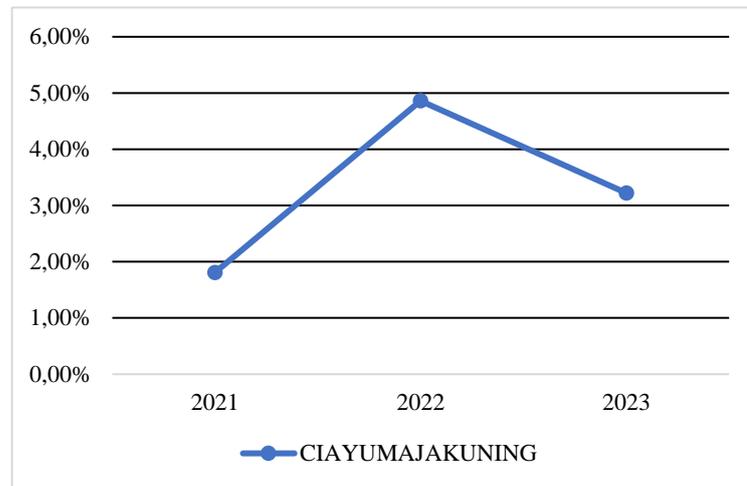
Setelah melihat presentase realisasi belanja bantuan sosial di wilayah Ciayumajakuning, penting untuk mempertimbangkan faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian, salah satunya adalah inflasi, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi berperan sebagai indikator krusial dalam dinamika ekonomi, sehingga tingkat perkembangannya perlu dikendalikan agar tetap rendah maupun stabil guna menghindari disrupsi makroekonomi yang berpotensi mengancam keseimbangan perekonomian. Fenomena inflasi sendiri dapat memunculkan implikasi yang bersifat dualistik baik konstruktif maupun kontraproduktif pada aktivitas ekonomi. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, Bank Indonesia mempunyai opsi guna mengimplementasikan kebijakan moneter ekspansif melalui instrumen seperti penurunan suku bunga acuan. Namun, tingginya inflasi serta tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan dalam perekonomian, yang menyebabkan harga barang dan jasa naik secara terus-

menerus, berujung pada peningkatan kemiskinan. Peningkatan inflasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong spekulasi ataupun spekulasinya, serta gangguan dalam distribusi barang yang tidak lancar, yang pada akhirnya membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena harga barang dan jasa yang semakin mahal, sehingga memperburuk tingkat kemiskinan (Ningsih & Andiny, 2018).

Dalam ekonomi, inflasi merujuk pada proses kenaikan harga jasa maupun barang secara keseluruhan yang terjadi akibat mekanisme pasar. Kenaikan ini dapat dipicu oleh beragam determinan, antara lain eskalasi aktivitas konsumsi masyarakat serta surplus likuiditas dalam sistem pasar yang berpotensi mengakselerasi perilaku konsumtif maupun spekulatif, serta gangguan dalam distribusi barang yang tidak lancar (Dwi Puspa, 2016).

Tingkat inflasi di suatu provinsi tidak selalu mencerminkan kondisi di semua kabupaten atau kota karena dapat bervariasi akibat perbedaan sektor ekonomi, kebijakan daerah, harga barang dan jasa, serta tingkat pendapatan di masing-masing wilayah, sehingga jika data inflasi untuk suatu kabupaten atau kota tidak tersedia, data inflasi dari provinsi atau kabupaten/kota lain yang ada dapat digunakan sebagai referensi, meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lokal.

Gambar 1.7. Presentase Tingkat Inflasi Wilayah CIAYUMAJAKUNING



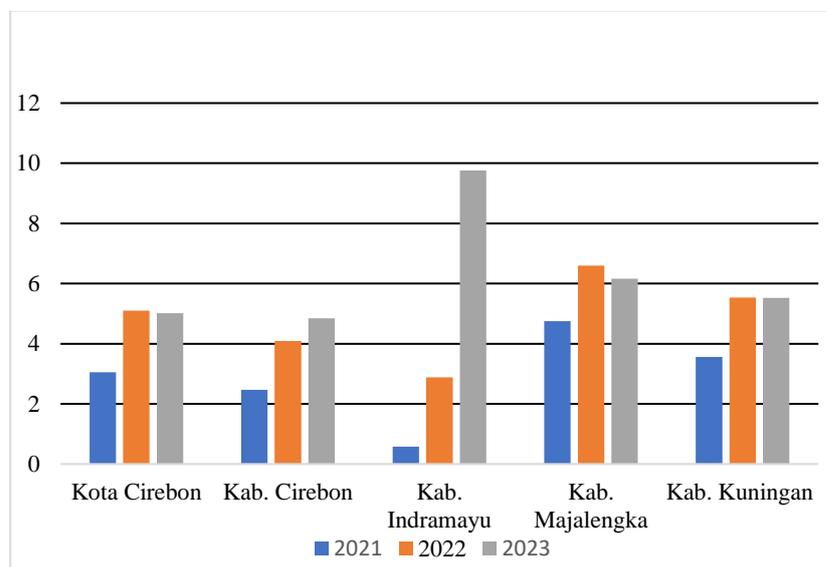
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Data inflasi di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan fluktuasi. Pada 2021, inflasi tercatat sebesar 1,81%, yang relatif rendah. Pada 2022, inflasi meningkat tajam menjadi 4,86%, mencerminkan adanya tekanan harga yang lebih besar. Pada 2023, inflasi menurun menjadi 3,22%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2021.

Setelah memperhatikan fluktuasi inflasi di wilayah Ciayumajakuning, perlu juga dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi, karena pertumbuhan yang positif dapat mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur penting dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara atau daerah, yang terjadi ketika ada peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Romi dan Umiyati (2018) Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan perekonomian untuk menciptakan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat

mempunyai pengaruhnya yang negatif pada tingkatan kemiskinan, mengakibatkan penurunan kesejahteraan dan munculnya masalah sosial yang mendasar. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan ekonomi juga semakin bertambah, sehingga diperlukan peningkatan pendapatan setiap tahun. Kenaikan pendapatan ini umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Fahmi, 2022).

Gambar 1.8. Presentase Pertumbuhan Ekonomi Wilayah CIAYUMAJAKUNING



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Data pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning antara 2021 hingga 2023 menunjukkan angka-angka yang relatif rendah dan tidak stabil. Kota Cirebon mengalami pertumbuhan dari 3,05% pada 2021 menjadi 5,01% pada 2023. Kabupaten Cirebon mencatatkan kenaikan dari 2,47% menjadi 4,85%. Kabupaten Indramayu mengalami lonjakan besar dari 0,58% menjadi 9,76%. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan juga mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun angka-angka tersebut tetap menunjukkan potensi yang terbatas.

Berdasarkan uraian variabel makro yang meliputi data dan fakta empiris mengenai Gini Rasio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi, penelitian ini menjadi penting karena wilayah Ciayumajakuning masih jarang menjadi fokus kajian, khususnya terkait dengan pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan. Melihat hal ini, menganalisis wilayah ini menjadi sangat krusial untuk memahami dinamika ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan menghubungkan variabel-variabel tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai berbagai faktor ekonomi yang berperan dalam kemiskinan di wilayah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi kekurangan penelitian yang ada, memberikan wawasan baru, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam Langkah strategis guna mengatasi kemiskinan di Ciayumajakuning.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Gini Rasio terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING?
2. Apakah ada pengaruh Realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING?
3. Apakah ada pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING?
4. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Gini Rasio terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan di Wilayah CIAYUMAJAKUNING.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun tujuannya dilakukan penelitian ini guna menganalisis pengaruh Gini Rasio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan di wilayah Ciayumajakuning, dengan digunakannya data panel dengan periode dari tahun 2014 - 2023. Variabel yang dianalisis mencakup Gini Ratio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi. Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, sementara belanja bantuan sosial diukur sebagai pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat Inflasi diukur untuk melihat dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan kondisi perekonomian di wilayah tersebut.

Kedalaman Kemiskinan sebagai variabel dependen akan diukur menggunakan indeks kemiskinan resmi oleh Badan Pusat Statistik.

Penelitian ini hanya akan melihat kemiskinan dari perspektif variabel makro dan mikro atau kebijakan ekonomi makro dan mikro, dan bukan dari sisi mikro, seperti perilaku individu atau rumah tangga. Data yang diperlukan akan dikumpulkan dari sumber statistik resmi, di antaranya BPS maupun lembaga terkait lainnya. Analisis data panel akan diterapkan untuk menggali hubungan antar variabel, dengan metode regresi linear berganda yang diadopsi guna menilai tingkatan pengaruhnya dari setiap variabel independen pada tingkat kemiskinan.

1.5 Manfaat Penelitian

Bagi Akademisi

Temuan ini memberikan pemahaman yang rinci mengenai pengaruh Gini Rasio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, maupun Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kedalaman Kemiskinan di wilayah Ciayumajakuning. Selain itu, penelitian ini juga membantu peneliti mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk kajian lanjutan dalam bidang ekonomi makro, mikro dan statistik.

Bagi Pemerintah

Temuan ini menyajikan basis informasi maupun telaah analitis yang konstruktif bagi perumus kebijakan publik guna mengatasi kedalaman kemiskinan di wilayah Ciayumajakuning, dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti Gini Ratio, Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil temuan ini juga mampu menjadi landasan dalam memberikan rancangan kebijakan yang fokus pada pengurangan ketimpangan pendapatan, peningkatan

bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi Kedalaman Kemiskinan di wilayah Ciayumajakuning. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara berbagai variabel ekonomi seperti Gini Ratio, Belanja Bantuan Sosial, Pengangguran, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan ekonomi dan memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kesejahteraan bersama.